

**NOTULA RAPAT KOORDINASI**  
**Jumat, 13 Februari 2015 – Ruang Sidang DSS**  
**(Gedung A Lantai 2)**

**Pimpinan Rapat** : Sekretaris Jenderal  
**Undangan** : 1. Eselon 1;  
                  2. Sekretaris Unit Utama;  
                  3. Kepala Biro PKLN Kemendikbud;  
                  4. Tim Bappenas.  
**Waktu Rapat** : Mulai pukul 09.50 WIB dan berakhir pukul 11.45 WIB  
**Agenda Rapat** : Pembahasan Telaah RPJMN dan Nawacita

Sekretaris Jenderal membuka rapat dan mempersilakan para pembicara untuk pembahasan agenda sebagai berikut:

1. **Analisis Kesenjangan Indikator Nawacita dan RPJMN 2015-2019 Bidang Hankam, Agama, Pendidikan, dan Ekonomi oleh Eva Kusuma Sundari (relawan mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan)**
  - a. Metode yang digunakan dalam membedah RPJMN adalah pelibatan tim CSO yang terdiri dari anggota-anggota ahli (*expert*). Metode kerja CSO adalah dengan melakukan *review* terhadap *draft*, pertemuan dengan Menteri/Kepala Bappenas, *review* RPJMN final, CSO *workshop*, pertemuan K/L dan Bappenas.
  - b. Tim akan mendorong usulan prioritas kepada K/L dan melakukan *constructive engagement* untuk memperkecil *gap* antara RPJMN final dan nawacita.
  - c. Tim menyampaikan temuan adanya target nawacita yang dihilangkan atau diturunkan dalam target RPJMN, dan hilangnya beberapa strategi dan pendekatan komprehensif dalam nawacita.
  - d. Berdasarkan catatan tim, ada penurunan indikator angka partisipasi sekolah untuk anak SD di RPJMN (100% menjadi 85%). Di samping itu, target di RPJMN menekankan pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas, namun belum memasukkan pemenuhan akses infrastruktur seperti jalan dan sarana transportasi sebagaimana tertuang dalam nawacita.

2. Telaah Nawacita dengan RPJMN Bidang Pendidikan oleh Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)
- a. Sekjen FSGI memaparkan masalah dasar yang harus dibenahi dalam urusan pendidikan, diantaranya adalah:
    - 1) Implementasi kurikulum 2013  
Sekolah masih kebingungan dalam menerapkan kebijakan kurikulum, khususnya dalam hal penilaian rapor, sementara itu Dinas Pendidikan belum memahami tindak lanjut terhadap pemberlakuan kembali ke Kurikulum 2006.
    - 2) Ujian Nasional
    - 3) Masalah keragaman di sekolah negeri yang mendiskriminasikan agama minoritas
    - 4) Darurat kekerasan dalam pendidikan berupa ketidakberdayaan sekolah dalam memberikan sanksi kepada siswa
    - 5) Korupsi pendidikan.
  - b. Masalah lain yang harus dihadapi adalah rendahnya kualitas pendidikan baik dari sisi siswa dan guru. Peningkatan kualitas guru dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas siswa.
  - c. Ditemukan banyak indikator RPJMN yang tidak memiliki arah yang sama dengan keinginan nawacita.
  - d. Untuk beberapa kegiatan, Kemendikbud perlu melakukan kerja sama lintas sektoral dengan K/L lain. Misalkan terkait urusan pembangunan fisik sekolah, khususnya untuk daerah 3 T, perlu ada kerja sama lintas sektoral dengan Kementerian Pekerjaan Umum, misalkan untuk penyediaan listrik.
3. Telaah Nawacita dan RPJMN pada Bidang Pendidikan Nonformal
- a. Karakter kebangsaan yang ingin dibangun melalui pengembangan kurikulum pendidikan adalah mengenai sikap inklusif, kepemimpinan di masyarakat, dan kesetaraan.
  - b. Perlu dipastikan bahwa pendidikan orang tua tidak menjadi beban baru dengan penambahan kelembagaan formal, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Keayuhbundaan. Pendeklegasian tugas dan perhatian pendidikan di luar sekolah seyogyanya dapat dilakukan dengan memperkuat serikat wali. Hal yang terpenting adalah upaya meningkatkan komunikasi antara guru dan wali siswa.

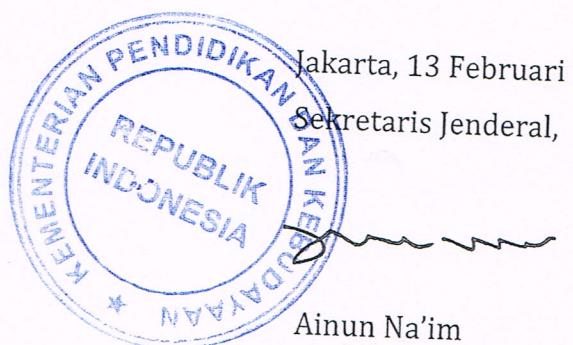
- c. Perlu ada perhatian lebih terhadap pendidikan nonformal dalam RPJMN, khususnya bagi masyarakat miskin dan minoritas.
  - d. Perlu dilakukan upaya percepatan kesetaraan gender di sekolah, sehingga guru-guru dapat mengembangkan nilai kesetaraan dalam pendidikan.
4. **Telaah Nawacita dan RPJMN pada Bidang Kebudayaan oleh Mokh. Sobirin (Koalisi Pengawal Nawacita)**
- a. Dalam permuseuman, RPJMN sudah sesuai dengan target pada nawacita, namun perlu ditambahkan detail nama museum yang akan diperbaharui dan dibangun.
  - b. Terdapat tiga mandat dari nawacita yang tidak terdapat pada RPJMN, yaitu pembentukan lembaga kebudayaan, pertukaran budaya antar daerah dan membangun kepedulian gotong royong.
  - c. Tim mempertanyakan posisi teater, sastra, dan unsur-unsur budaya lainnya dalam RPJMN, mengingat prioritas hanya pada Lembaga Sensor Film dan urusan perfilman.
5. **Tanggapan dan Masukan dari Pimpinan Unit Utama Kemendikbud:**
- a. Sekretaris Jenderal Kemendikbud menyampaikan hal-hal berikut:
    - 1) RPJMN yang telah disahkan telah melalui proses pembahasan dan *review* dalam perspektif waktu yang lama. Paparan Sekjen FGSI pun masih ada yang belum sesuai dengan data atau belum termutakhirkan (misalkan adanya target penelitian dalam RPJMN pendidikan).
    - 2) RPJMN yang telah direvisi sesuai dengan visi pemerintah kabinet kerja telah disahkan berdasarkan Perpres Nomor 2 tahun 2015, dan disampaikan bahwa fungsi koordinasi ada di Bappenas.
    - 3) Harap diperhatikan bahwa identifikasi masalah adalah penting untuk penyusunan RPJMN. Suatu masalah harus dilihat apakah merupakan masalah yang strategis atau tidak; apakah kasus yang spesifik atau memang suatu masalah nasional dan strategis, sebab masalah yang bersifat kasus akan perlu penyelesaian/solusi yang berbeda dengan masalah yang sifatnya nasional.
  - b. Sekretaris BPSDMPK dan PMP menyampaikan bahwa terdapat target yang telah ditetapkan dalam RPJMN untuk meningkatkan kualitas guru dalam hal kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Apabila target tersebut dapat direalisasikan, maka permasalahan kualitas guru dapat teratasi.

- c. Dirjen Dikdas menyampaikan hal-hal berikut:
- 1) Bappenas sebagai penanggung jawab pengolahan final RPJMN, diharapkan dapat memfasilitasi pembahasan lanjutan atau revisi RPJMN sesuai dengan masukan tim berdasarkan hasil telaah nawacita.
  - 2) Perlu ada persamaan persepsi dengan angka indikator yang dimaksud, misalkan angka partisipasi (murni, kasar, sekolah). Perlu ada kesepakatan mengenai pilihan angka indikator yang digunakan. Untuk memenuhi target terpenuhinya 100% APM dalam nawacita, maka angka indikator yang dipakai adalah APK atau APS.
  - 3) Perlu persamaan persepsi mengenai perhitungan partisipasi, apakah dalam skala Kemendikbud, atau nasional (digabungkan dengan angka di Kementerian Agama).
  - 4) Perlu dilakukan analisis persoalan mendasar pendidikan per level, sehingga ada pemilahan tanggung jawab antara pusat (terkait dengan kebijakan dan program), dinas, dan sekolah.
  - 5) Maksimalkan program yang telah diregulasi dan pastikan dijalankan di sekolah-sekolah.
- d. Dirjen Kebudayaan:
- 1) *Narrowing gap* dapat dilakukan dalam penyusunan renstra kementerian.
  - 2) Detail jenis museum memang tidak disebutkan dalam RPJMN, namun sudah dilakukan pembangunan museum kemaritiman di berbagai daerah, dan sudah masuk dalam detail perencanaan. Aktivitas-aktivitas kemaritiman juga telah dilakukan, seperti revitalisasi budaya kemaritiman dan pelestarian cagar budaya dengan kajian aspek maritim.
  - 3) Telah dilakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan mengenai kode akun untuk kegiatan revitalisasi dan pembangunan rumah adat.
  - 4) Diinformasikan bahwa lebih dari 200 desa adat akan direvitalisasi.
  - 5) Diinformasikan pula bahwa telah dilakukan penataan kelembagaan pada Direktorat Kebudayaan seperti pembentukan kelembagaan kesenian dan perfilman.
  - 6) Ditjen Kebudayaan sedang mengupayakan penyelesaian UU kebudayaan dalam RPJMN, meskipun belum masuk ke prioritas 2015.

- e. Plt. Dirjen PAUDNI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Tim bedah dokumen RPJMN perlu memperhatikan aspek legal karena penyusunan dokumen RPJMN harus sesuai dengan UU sistem perencanaan.
  - 2) Perlu ada kecermatan dalam melakukan telaah mengingat *levelling* dapat berbeda-beda pada pernyataan dalam narasi indikator dan matriks antara RPJMN dan Nawacita, yakni dapat bersifat umum atau spesifik.
  - 3) APM 100% untuk usia 7-12 tahun dalam nawacita tidak dapat tercapai karena adanya fenomena *early entry* dan *early graduation*.
  - 4) FGD telah dilakukan untuk urusan pendidikan keayahan bundaan.
  - 5) Usulan untuk pendidikan orang dewasa mengerucut menjadi 2, yakni pendidikan keayahan bundaan dan pendidikan keluarga.
  - 6) Rencana pembentukan unit eselon baru dibangun sesuai kebutuhan. Misalkan Direktorat Pendidikan Keayahan bundaan dimunculkan dengan landasan bahwa siswa cenderung memiliki prestasi baik saat orang tuanya berpartisipasi aktif di sekolah.
- f. Kepala Balitbang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Mengenai istilah sistem pendidikan yang beragam, berdasarkan UUD harus memiliki satu sistem pendidikan nasional.
  - 2) Pemberlakuan 2 kurikulum dalam waktu bersamaan dimungkinkan secara legal, namun tetap terdapat target waktu penyerataan implementasi kurikulum.
- g. Sesditjen Pendidikan Dasar menyampaikan bahwa terkait dengan tindak lanjut kurikulum, Kemendikbud telah menyampaikan beberapa surat edaran untuk memberikan arahan implementasi kurikulum ke pemerintah daerah, dan dapat diunduh di layanan bantuan hukum di laman Kemendikbud.
- h. Tanggapan tim:
  - 1) Program dan kegiatan strategis harus ditanggapi dengan kebijakan yang sesuai.
  - 2) Berdasarkan studi lapangan dimana angka tingkat kekerasan linear dengan angka masuk sekolah, dipandang perlu agar sistem pendidikan harus

membangun karakter anti-kekerasan dan memastikan bahwa pendidikan akan menjadi sumber nilai-nilai pluralisme kebangsaan, bukan nilai ekslusivitas. Dengan pertimbangan tersebut, tim menekankan pentingnya usulan revisi UU Sisdiknas untuk membangun karakter anti-kekerasan dan ekslusivitas.

- i. Mendikbud memberikan arahan sebagai berikut:
  - 1) Menggarisbawahi bahwa butir-butir agenda yang dimuat dalam nawacita adalah wajib secara politik dan hukum untuk dilaksanakan.
  - 2) Dipandang perlu agar tim melakukan percepatan untuk *narrowing gap* antara RPJMN dan nawacita. Lakukan *review* awal, RPJMN harus dipastikan sesuai dengan nawacita.
  - 3) Melalui renstra, nawacita tetap dapat dilaksanakan tanpa menunggu proses revisi RPJMN.
  - 4) Program harus diimplementasikan menjadi gerakan. Perlu ada fokus pada 3 hal, yaitu penguatan aktor, akses dan kualitas; reformasi birokrasi pendidikan; dan keterlibatan masyarakat. Untuk keterlibatan masyarakat, direncanakan diadakan *workshop*.
  - 5) Terus upayakan pelibatan komunikasi untuk memastikan capaian-capaian yang sifatnya lintas kementerian dapat dikerjakan tanpa menimbulkan masalah.



Jakarta, 13 Februari 2015

Sekretaris Jenderal,